



Warga Miskin Berkurang 0,7 Persen

Dinsosnakertrans Tak Tahu Penyebabnya

JOGJA - Perekonomian nasional tahun lalu mengalami kemerosotan. Namun ini tak berlaku di Kota Jogja. Perekonomian cenderung stabil dan ujung-ujungnya membuat jumlah angka warga miskin mengalami penurunan. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, angka warga miskin tahun 2016 hanya 18.730 kepala keluarga (KK). Jumlah itu turun dari tahun 2015

Maryatun menambahkan, dalam verifikasi tersebut, tak diketahui penyebabnya. Namun, jika membaca data penilaian tujuh aspek dan 17 parameter, rata-rata pemegang JPS tersebut karena pendapatan kurang dari Rp 300 ribu per orang dalam sebulan. "Ada sekitar 17.735 KK yang pendapatan dalam sebulan kurang dari Rp 300 ribu," katanya.

Hadi melanjutkan, dengan adanya JPS tersebut, warga yang ingin menambah pendapatan bisa mengajukan bantuan modal untuk usaha. Bahkan, Dinsosnakertrans juga menyiapkan pelatihan, agar 17.735 KK tersebut

yang mencapai 18.881 KK. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,7 persen.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Mochtar mengungkapkan, dari pendataan untuk jaminan perlindungan sosial (JPS), ada sekitar 151 KK yang mentas.

"Dari hasil penilaian yang kami dengan tujuh aspek dan 17 parameter, mereka sudah keluar dari rentan miskin," ungkap Hadi kemarin (18/1).

Ia mengungkapkan, dari total 18.730 KK tersebut, ada 60.195 jiwa. Jumlah penerima JPS atau Kartu Menuju Sehat (KMS) ini telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal

Nomor 452 Tahun 2015.

Hanya saja, meski mengetahui jumlah yang mentas dari kemiskinan, Hadi tak mengetahui penyebabnya. Dinsosnakertrans hanya mencatat jika dari verifikasi ada 239 KK meninggal, 522 KK pindah, dan tidak ketemu 160 KK.

"Ini yang menarik, 190 KK menolak didata. Mereka merasa mampu, sehingga tak membutuhkan JPS ini," tambahnya.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Tri

bisa bertambah produktif.

"Mereka (pemegang JPS) kami prioritaskan," tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

Jumlah pemegang KMS yang turun ini mendapatkan perhatian Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi. Ia berpesan, penurunan jumlah pemegang KMS ini bukan bagian dari politik.

"Artinya, bukan pencitraan kepala daerah. Tapi, memang kondisi riilnya seperti itu," tegasnya.

Jika penurunan jumlah pemegang KMS ini malah menjadi bahan untuk pencitraan, Fahmi mendesak dilakukan pengecekan ulang. Terlebih, hal

tersebut (data pemegang KMS) harus benar-benar objektif.

"Sebab, usulan RW sangat banyak mencapai 7.272 KK. Ketika diverifikasi, jumlahnya hanya 3.942 KK," ujarnya.

Dari data pemegang JPS tahun 2016, jumlah warga rentan miskin mengalami peningkatan. Meski totalnya mengalami penurunan. Jumlah warga rentan miskin tahun 2014 mencapai 10.510. Tahun ini jumlahnya menjadi 13.361.

"Memang penanganan kemiskinan seharusnya komprehensif. Tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja," katanya. (eri/hes/cl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005